

Perubahan Pengetahuan Dan Sikap Politik Masyarakat Berbasis *Information And Social Approach* (Strategi Komunikasi Politik dalam Meminimalisasi *Absentia Voters* di Sampang Madura)

Nikmah Suryandari
Farida Nurul Rahmawati
Netty Dyah Kurniasari



Kabupaten di pulau Madura memiliki rekor tertinggi dan tinggi se Jawa Timur untuk persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu Kabupaten Sampang 65.231 suara (13,91%), Kabupaten Bangkalan 62.502 suara (13,56%), Kabupaten Sumenep 55.854 suara (8,05%), dan Kabupaten Pamekasan 35.352 suara (7,88%). Upaya pemerintah dalam meminimalisasi angka golput masih menggunakan strategi yang sama untuk semua khalayak. Padahal, hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan bahwa masing-masing khalayak mempunyai perbedaan demografi, sosial ekonomi dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan strategi komunikasi politik yang efektif untuk meminimalisasi angka golput di Madura berdasarkan pendekatan sosial informasi. Pada dasarnya golput di Sampang dapat dikategorikan dalam 2 kelompok dengan perbedaan karakter, yaitu golput di pedesaan dan golput di perkotaan. Perbedaan karakter dari masing-masing kelompok ini memerlukan strategi komunikasi yang berbeda dari aspek komunikasi, baik sumber atau penyampai pesan, isi pesan, media, maupun efek yang ditimbulkan. Tingginya angka golput di Sampang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan kepada penyelenggaraan dan peserta. Sehingga masyarakat di Sampang beranggapan ikut atau tidak dalam tidak memberikan perubahan yang berarti bagi kehidupan keluarga. Menurut pengakuan narasumber banyak warga mengambil sikap menjadi golput dan cenderung bersikap apatis, tak mau peduli dan tidak ikut berpartisipasi di dalamnya.



The number of non-voters in Madura is still high. The regencies in Madura have the highest rates in East Java in terms of their participation in using voting rights. The participation rates of the four regencies are as follows: Sampang 65,231 votes (13.91%), Bangkalan 62,502 votes (13.56%), Sumenep 55,854 votes (8.05%), and Pamekasan 35,352 votes (7.88%). At present the government still uses the same strategy model for all public, which is contradictory to the fact that different public have different demographic, social, economic, and cultural characteristics. The aim of this research is to find effective political communication strategies to minimize non-voters in Madura-based information and social approach.



Fenomena *absentia voters* (AV) atau golput merupakan permasalahan yang krusial dan belum kunjung usai. Permasalahan ini makin terlihat jelas menjelang pesta pemilihan umum. Terlebih sejak tahun 2004 Indonesia mulai melaksanakan pemilu secara langsung baik pada pemilihan Kades, Bupati, Walikota, Gubernur, Legislatif sampai Presiden. Sehingga dapat dipastikan dalam rentang waktu lima tahun masyarakat melakukan lebih dari 5 kali pemilihan.

Berkaca dari pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah prosentasenya diprediksi berada dikisaran 20%-30%. Menurut Dradjat Tri Kartono angka itu bahkan bisa jauh lebih besar lagi kalau mulai saat ini tidak dilakukan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan haknya. (Media Indonesia, Kamis, 13 November 2008)

Golongan Putih (Golput) merupakan hasil dari pengalaman sejarah masa lalu perpolitikan di Indonesia yang membuat rakyat semakin menjauh dari situs politik. Tidak segan-segannya mereka bersikap cuek dan masa bodoh. Semua itu mencuat kepermukaan disebabkan karena kekecewaan dengan situasi bangsa yang semakin tidak nyaman dan tidak kondusif. Tidaklah heran jika pada Pemilu 2004, muncul bak jamur di musim hujan kelompok Golongan Putih (Golput) yang ikut menyemarakkan suasana pesta rakyat. Golongan ini tumbuh dengan subur tanpa harus digalang dengan iming-iming kursi jabatan atau kedudukan, karena pupuk masa lalu dan kondisi bangsa yang tidak mau belajar dari sejarah.

Mereka memilih Golput ada yang lahir dari sebuah bentuk perlawanan, ada juga yang karena salah teknis dalam mencoblos karena tidak tahu. Ada pula yang tahu, tapi tidak menemukan pilihan tepat terhadap partai mana yang akan dijadikan tambatan hati. Jadi bukannya menjadi Golput lalu memperoleh atribut sebagai warga negara yang tidak baik, tidak punya tanggung jawab atau barangkali kualitas jiwa nasionalismenya diragukan. Namun, menjadi Golput bukan hanya alasan politis semata tetapi persoalan yang mendasar karena berbagai kendala teknis juga bisa menjadikan seseorang Golput, termasuk ketidakpercayaan pada sistem demokrasi, ikut andil cukup besar untuk mencetak sebagai anggota Golput.

Absentia Voter (Golput) dalam Pemilu di Indonesia

Pemilu	Terdaftar	Suara Sah	Tidak hadir	Angka AV (%)	Kenaikan
1955	43.104.464	37.785.299	5.319.165	12,34	
1971	58.556.776	54.669.509	3.889.267	6,67	(-) 5,67
1977	69.871.092	63.998.344	5.872.748	8,4	(+) 1,73
1982	82.134.195	75.126.306	7.007.889	9,61	(+) 1,21
1987	93.737.633	85.869.816	7.867.817	8,39	(-) 0,22
1992	107.565.697	97.789.534	9.776.163	9,05	(+) 0,26
1997	124.740.987	112.991.150	11.749.837	10,07	(+) 1,02
1999	117.815.053	105.786.661	12.028.392	10,4	(+) 0,34
2004	148.000.369	113.462.414	34.537.955	23,34	(+) 13,30

Sumber : Valina Singka Subekti, *Fenomena Golput dari Tahun ke Tahun dalam*

Jurnal DIALOG Kebijakan Publik Edisi 4/Desember/Tahun II/2008.

Selain itu, dari data pusat studi dan kawasan UGM diperoleh informasi tentang “perolehan suara Golput” sejak 1971 (Era Orde Baru) sampai pemilu 2009 sebagai berikut.

- 1971 : 6.64 %
- 1977 : 8.40 %
- 1982 : 8.53 %
- 1987 : 8.39%
- 1992 : 9.09 %
- 1997 : 9.42 %
- 1999 : 10.21 %
- 2004 : 23.34 %
- 2009 : 39.1%

Data : 1971-2004 dari *Pusat Studi dan Kawasan UGM*; 2009 dari data sementara hasil lembaga survei.

Kabupaten di pulau Madura memiliki rekor tertinggi dan tinggi se-Jawa Timur untuk persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu Kabupaten Sampang 65.231 suara (13,91%), Kabupaten Bangkalan 62.502 suara (13,56%), Kabupaten Sumenep 55.854 suara (8,05%), dan Kabupaten Pamekasan 35.352 suara (7,88%).

Tingginya *absentia voters* disebabkan beberapa hal yaitu hari pemberian suara berhimpitan dengan masa tanam tembakau sehingga kesempatan ekonomis ini lebih diprioritaskan. Di sisi lain penyebab Golput tersebut juga dikarenakan tumbuhnya kesadaran baru bahwa memilih merupakan hak, sehingga pihak lain tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk menggunakan hak tersebut. Selain itu meningkatnya AV juga disebabkan calon pemilih yang enggan datang ke tempat pemberian suara karena kurangnya sosialisasi dan informasi yang terbatas. Hal ini diperparah dengan tingkat pendidikan masyarakat Madura yang terendah di Jawa Timur.

Dari fenomena di atas diperlukan sebuah strategi komunikasi politik yang efektif untuk meminimalisir *absentia voters* di Madura. Berbagai strategi komunikasi politik untuk meminimalisir *absentia voters* dilakukan pemerintah telah banyak dilaksanakan namun masih bersifat top down, belum melibatkan masyarakat (bottom up). Selain itu, sampai saat ini pemerintah masih menggunakan model strategi yang sama untuk semua khalayak. Padahal masing-masing khalayak memiliki karakteristik demografi, sosial ekonomi dan budaya yang berbeda-beda dan memiliki keunikan masing-masing.

Penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik dan pemilihan media yang efektif untuk mengurangi *absentia voters* di Madura berbasis *information and social approach*.

Tujuan umum penelitian ini adalah menghasilkan strategi komunikasi politik yang efektif dan pemilihan media yang tepat untuk meminimalisir *absentia voters*. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian di tahun pertama ini adalah (1) menghasilkan profil demografi, sosial ekonomi, sosial budaya. (2) Mengidentifikasi pengetahuan dan sikap politik masyarakat. (3) mengetahui latar belakang golput. Hal ini akan menjadi dasar penyusunan strategi komunikasi politik dalam rangka pemilihan media yang tepat untuk penyampaian pesan sosialisasi Pemilu di

Madura (4) Mengidentifikasi sumber pesan, media penyampaian pesan, cara penyampaian pesan dan isi pesan yang selama ini telah dilakukan berdasarkan pengelompokan karakteristik sosio demografi (umur, jenis kelamin, pendidikan dan pendapatan). (5) Merumuskan strategi komunikasi politik dan pemilihan media yang efektif, implementatif dan adaptif untuk sosialisasi Pemilu dalam rangka meminimalisir *absentia voters* di daerah Madura. Menghasilkan sebuah strategi komunikasi politik dan pemilihan media yang adaptif, aplikabel dan efektif berbasis *information and social approach* dalam rangka meminimalisir jumlah *absentia voters* di Sampang Madura.

Tinjauan Pustaka

Salah satu penyebab *absentia voters* adalah karena minimnya informasi dan sosialisasi Pemilu. Media massa yang seharusnya bisa melakukan fungsi pendidikan politik ternyata kurang melakukan fungsi tersebut. Selain itu, berbagai strategi komunikasi politik untuk meminimalisir *absentia voters* memang telah dilakukan pemerintah namun masih bersifat top down, belum melibatkan masyarakat (bottom up). Sampai saat ini pemerintah masih menggunakan model strategi yang sama untuk semua khalayak. Padahal masing-masing khalayak memiliki karakteristik demografi, sosial ekonomi dan budaya yang berbeda-beda dan memiliki keunikan masing-masing. Dalam rangka menyusun sebuah strategi komunikasi politik yang sesuai dengan kondisi khalayak setempat, digunakan *Information and social approach*. Pendekatan ini melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga diharapkan bisa menghasilkan sebuah strategi komunikasi politik yang efektif.

Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang

ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Hal senada juga disampaikan oleh Harun (2006:hal 5), komunikasi politik adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan dalam rangka membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan symbol-simbol yang berarti.

Dari definisi di atas, dapat disampaikan bahwa komunikasi politik memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 1) aktivitas yang diarahkan menuju pembentukan, mobilisasi dan pengembangan partai dan pergerakan politik; 2) semua bentuk kampanye politik yang terorganisasi yang disusun untuk meningkatkan dukungan politis; 3) semua proses yang mencakup manajemen opini publik; 4) aktivitas dari media massa yang ada dalam melaporkan dan mengomentari peristiwa politik; 5) proses informasi publik dan debat yang berkaitan dengan kebijakan politik

Alat Komunikasi Politik

Dalam proses komunikasi politik, pesan-pesan komunikasi mengalir dalam struktur formal dan nonformal menuju komunikasi yang berada dalam setiap lapisan masyarakat. Pesan-pesan komunikasi politik tersebut ditransformasi melalui media massa, komunikasi kontak langsung dan menggunakan jaringan-jaringan komunikasi infrastruktur.

Dalam komunikasi politik, maka komunikasi sebagai unsur dinamis untuk membentuk sikap dan perilaku politik yang bersifat integritas dan komit terhadap sistem yang sedang berlangsung sekaligus melestarikannya. Salah satu upaya yang dilakukan terhadap unsur-unsur dinamis tersebut yaitu dengan unsur dinamis lainnya seperti sosialisasi. Sosialisasi politik menurut Alexis S. Tan (1980) menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses perubahan perilaku yang berhubungan erat dengan proses belajar. Dalam proses ini terjadi penyetaraan pemahaman terhadap segala peristiwa politik. Sosialisasi politik lebih bersifat psikologis sorotan psikologis, yaitu dalam kaitan pembentukan sikap perilaku dan kepribadian. Hal ini menandai bahwa

sosialisasi politik sebagai proses yang berlangsung relatif lama dan kompleks

Perilaku dan Sikap Politik

Komunikasi politik merupakan bagian dari *behavioral science*. Sesuai dengan pendekatan baru ilmu politik yang mulai bergeser ke pendekatan tingkah laku manusia (*behavioral approach*) dengan cara memiliki gejala-gejala dan peristiwa politik sebagai akibat perilaku manusia. Perilaku politik merupakan cerminan dari budaya politik (*political culture*) suatu masyarakat atau sebagai cerminan dari suatu pola keyakinan tertentu yang menjadi identitas pembeda terhadap perilaku menurut pola-pola lain.

Rusadi Kantaprawira (1983) menyatakan bahwa perilaku politik sebagai salah satu telaah tentang tindakan manusia dalam situasi politik. Cakupan situasi politik meliputi berbagai macam problema, respon-respon emosional, berupa dukungan maupun apati kepada pemerintah, respon terhadap perundangan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Absentia Voters (Golput)

Absentia Voters (Golput) merupakan hasil dari pengalaman sejarah masa lalu perpolitikan di Indonesia yang membuat rakyat semakin menjauh dari situs politik. Tidak segan-segannya mereka bersikap cuek dan masa bodoh. Semua itu mencuat ke permukaan disebabkan karena kekecewaan dengan situasi bangsa yang semakin tidak nyaman dan tidak kondusif. Tidaklah heran jika pada Pemilu 2004, muncul bak jamur di musim hujan kelompok Golongan Putih (Golput) yang ikut menyemarakkan suasana pesta rakyat. Golongan ini tumbuh dengan subur tanpa harus digalang dengan iming-iming kursi jabatan atau kedudukan, karena pupuk masa lalu dan kondisi bangsa yang tidak mau belajar dari sejarah.

Golput lahir pada tahun 1971 yang dipelopori Arif Budiman. Akar permasalahannya, pilihan terhadap salah satu partai dari stock yang ada tidak memenuhi syarat untuk dipilih. Dengan tidak memilih, cap sebagai Golput pun menjadi

paten. Itulah iklim demokrasi yang harus dihargai sehingga setiap warga negara punya pilihan. Boleh memilih untuk tidak memilih itupun sudah sebuah pilihan. Mereka memilih Golput ada yang lahir dari sebuah bentuk perlawanan, ada juga yang karena salah teknis dalam mencoblos karena tidak tahu. Ada pula yang tahu, tapi tidak menemukan pilihan tepat terhadap partai mana yang akan dijadikan tambatan hati. Jadi bukannya menjadi Golput lalu memperoleh atribut sebagai warga negara yang tidak baik, tidak punya tanggung jawab atau barangkali kualitas jiwa nasionalismenya diragukan. Namun, menjadi Golput bukan hanya alasan politis semata tetapi persoalan yang mendasar karena berbagai kendala teknis juga bisa menjadikan seseorang Golput, termasuk ketidakpercayaan pada sistem demokrasi, ikut andil cukup besar untuk mencetak sebagai anggota Golput.

Informatif and Social Approach

Pendekatan informatif.

Dalam pendekatan ini digunakan cara-cara untuk memberikan informasi yang benar mengenai pelaksanaan Pemilu yang baik baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pendekatan ini juga akan dijelaskan posisi pemilih sebagai hak atau kewajiban. Hal ini sangat vital dimana dengan adanya penjelasan secara lengkap, para pemilih tidak akan rancu lagi memandang proses Pemilu sebagai sesuatu yang sia-sia saja, sehingga dapat membangun rasa kepercayaan diri pemilih terutama penganut Golput

Pendekatan sosial.

Pendekatan ini menggunakan cara-cara sosial dalam menyampaikan informasi yang ingin disampaikan kepada audience. Dalam masalah Golput ini, pendekatan sosial sangat vital peranannya sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan kampanye anti Golput ini, karena dengan pendekatan sosial ini ingin ditekankan bahwa Golput bukan cara yang baik dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Dalam pendekatan ini, kampanye yang dilakukan akan mengajak para pelaku Golput untuk memikirkan tindakannya lagi dengan memberikan pilihan-

pilihan lain yang lebih bertanggung jawab tanpa menuduh mereka telah berbuat salah. Hal ini akan membuat kampanye anti Golput ini akan lebih mudah diterima di masyarakat tanpa ada tendensi negatif yang menyertainya

Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Sampang, yaitu 7 kecamatan dengan angka golput tertinggi yaitu kecamatan Sampang, Pengarengan, Camplong, Jrengik, Sreseh, Banyuates dan Tambelangan.

Obyek penelitian ini ada dua yaitu: 1) DPT (daftar pemilih tetap) Pemilu Gubernur tahun 2009 di 7 kecamatan di Kabupaten Sampang dengan angka golput tertinggi pada Pemilu pada 2009, yaitu Kecamatan Sampang, Camplong, Banyuates, Jrengik, Sreseh, Tambelangan, Pengarengan; 2) Golput yang berada di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Sampang, Camplong, Banyuates, Jrengik, Sreseh, Tambelangan, Pengarengan.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Untuk memperoleh profil demografi dilakukan pengumpulan data sekunder mengenai demografi (usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan). Sedangkan untuk memperoleh data social ekonomi, sosial budaya, pengetahuan dan sikap politik masyarakat digunakan teknik pengambilan data melalui observasi dan wawancara terstruktur. Wawancara mendalam (*depth interview*) Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman kuesioner.

Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki empat karakteristik yakni (1) teknik analisisnya bersifat induktif, (2) analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, (3) analisis data dilakukan secara interaktif dan (4) analisis data dilakukan secara terus menerus / siklus (Sutopo, 2002 : 39)

Kajian Komponen Komunikasi sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi Pemilu di Sampang

Komunikator

Tokoh yang disukai untuk menyampaikan pesan tersebut adalah Petugas , aparat desa (Kades, Sekdes, RT, RW), menyusul kemudian kyai.

Pesan

Masyarakat sebagian besar mendapatkan informasi tentang Pemilu dari media baru kemudian tokoh masyarakat. Namun sayangnya informasi tersebut hanya mengenai hari H menurut mereka tidak dilengkapi dengan cara dan teknis pelaksanaan pencontrengan. Informasi dari media berupa informasi tentang adanya pelaksanaan pada hari dan tanggal tertentu. Sedangkan mengenai info-info mendasar dan teknis , masyarakat mengakui tidak mendapatkannya dari media. Dari pengetahuan responden di atas, rata-rata responden menginginkan bila ada informasi mengenai maka harus mencakup empat hal yaitu waktu pelaksanaan, calon yang akan dipilih, cara atau teknis pencontrengan yang benar, serta Masyarakat sebagian besar mendapatkan informasi tentang Pemilu dari media baru kemudian tokoh masyarakat. Namun sayangnya informasi tersebut hanya mengenai hari H menurut mereka tidak dilengkapi dengan cara dan teknis pelaksanaan pencontrengan.

Media

Mayoritas responden pernah mendapatkan atau menerima informasi tentang melalui papan reklame, selebaran, poster dan cetakan lain. Format media yang mereka sukai jika ada pesan pemberantasan yang tertinggi adalah informasi formal melalui ceramah dan pidato (30%), melalui permainan games dan kuis (20 %), melalui leaflead, brosur dan baliho (10%), sedangkan sisanya 40.% lagi dalam bentuk kesenian (Sandur, Topeng Dalang, Tanjidor, Drama, Ludruk dan Lagu). Pemilihan terhadap bentuk penyampaian yang disukai responden tersebut ternyata berhubungan dengan tingkat pendidikan responden. Bentuk informs serius (ceramah, pidato) dipilih responden yang berpendidikan tinggi sebanyak 90 %. Sepuluh persen responden yang berpendidikan tinggi memilih bentuk permainan. Sedangkan bentuk kesenian dan permainan dipilih responden yang berpendidikan dasar menengah sebanyak 80%, dan sisainya (.20%) memilih informasi serius. Dengan mengetahui *strategi komunikasi* tentang maka akan dapat ditentukan channel (media) untuk melakukan social change.

Sasaran/ Komunikan

Sasaran dalam strategi komunikasi ini adalah masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun di perkotaan yang memiliki hak pilih. Dengan perbedaan karakter yang berbeda antara pemilih di pedesaan dan perkotaan, menjadikan strategi komunikasi yang digunakan juga berbeda.

Noise

Dalam pelaksanaan strategi komunikasi ini, ada gangguan atau noise diantaranya adalah kendala bahasa, tempat tinggal yang jauh rendahnya kesadaran akan pentingnya pemilu, serta rendahnya kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu.

Feedback/ Umpanbalik

Umpan balik atau feedback ini terlihat saat pelaksanaan pemilu periode berikutnya, unatuk melihat apakah pesan yang disampaikan dalam strategi komunikasi mengakibatkan feedback terhadap pemilih atau tidak.

Karakteristik Golput di Sampang

Secara umum kondisi Golput di Sampang terbagi dalam 2 kondisi, yaitu golput di wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan. Golput di pedesaan memerlukan strategi khususnya dalam perubahan pola pikir/mindset tentang Pemilu. Selama ini pemilu bagi masyarakat pedesaan identik dengan imbalan uang dari partai atau calon tertentu. Untuk golput di wilayah perkotaan, penyebab utama menjadi golput adalah karena hari H pencontrengan bersamaan dengan hari efektif kerja, sehingga mereka lebih memilih bekerja..

Golput di wilayah perkotaan

Golput di wilayah perkotaan sebagian terjadi karena alasan pekerjaan, yaitu hari H pencontrengan bersamaan dengan waktu bekerja. Berdasarkan data di lapangan, golput yang ada di wilayah perkotaan ada di kecamatan Pengarengan dan Kecamatan Sampang.

Golput di wilayah pedesaan

Golput di wilayah pedesaan lebih disebabkan oleh pola pikir atau mindset yang selama ini tertanam di masyarakat pedesaan. Menurut beberapa narasumber di pedesaan, pemilu identik dengan bagi-bagi uang agar memilih calon tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dan data di lapangan Golput di wilayah pedesaan Sampang ini sebagian besar berada di 5 kecamatan yaitu Jrengik, Sreseh, Tambelangan, Camplong,

Simpulan

Pada dasarnya golput di Sampang dapat dikategorikan dalam 2 kelompok dengan perbedaan karakter, yaitu golput di pedesaan dan golput di perkotaan. Perbedaan karakter dari masing-masing kelompok ini memerlukan strategi komunikasi yang berbeda dari aspek komunikasi, baik sumber atau penyampai pesan, isi pesan, media, maupun efek yang ditimbulkan. Tingginya angka golput di Sampang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan kepada penyelenggaraan dan peserta . Sehingga masyarakat di Sampang beranggapan ikut atau tidak dalam tidak memberikan perubahan yang berarti bagi kehidupan keluarga..Menurut pengakuan narasumber banyak warga mengambil sikap menjadi golput dan cenderung bersikap apatis, tak mau peduli dan tidak ikut berpartisipasi di dalamnya.

Saran

Masukan bagi pemerintah yang terkait untuk membuat program lebih berorientasi pada demografi dan keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Daftar Pustaka

- Faisal, Sanapiah.1990."Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi.Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Hendrowinoto, Nirwanto Ki S. Rame-Rame "Golput" (2003). Sinar Harapan. 06 Feb. 2004.
- Moleong, Lexy J.2000."Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng.1998. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Yogyakarta: Rake Sarasin.

Nasution, S.1996.” Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif.” Bandung: Tarsito.

Raharjo, Satjipto. 1981. “Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis”. Bandung: Penerbit Sinar Bandung.


Silaban, S.H, Sintong. Tindak Pidana Pemilu: Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.

Subekti, Valina Singka “Fenomena Golput dari Tahun ke Tahun” dalam Jurnal DIALOG Kebijakan Publik Edisi 4/Desember/Tahun II/2008.

Suprpto, Tommy dan Fahrianoor.2004.”Komunikasi Penyuluhan dalam Teori dan Praktek.”Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Tri Kartono, Drajat.2008. ”Potensi Golput pada Pemilu 2009 Cukup Tinggi ”. Media Indonesia Kamis (13/11).

Wignjosoebroto, Soetandyo.1998.“Memantau Pemilu Indonesia: Mengapa Penting?” . Jakarta: Konferensi Nasional KIPP.

<http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/jdkv/2004/jiunkpe-ns-s1-2004-42400013-8346-golput-chapter1.pdf> 

Sumber Lain :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E; Pemilu yang Luber dan Jurdil, lima tahun sekali, memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden, dan DPRD, diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi